

BAB V

KESIMPULAN

Amerika Serikat telah lama memainkan peran khusus dalam memengaruhi perilaku nuklir baik secara bilateral maupun kolektif. Mengingat sejarah AS sebagai kekuatan nuklir pertama dan statusnya saat ini sebagai satu-satunya negara adikuasa, Amerika Serikat memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan nonproliferasi. Secara historis, kebijakan nonproliferasi nuklir AS telah berfokus pada sisi permintaan. Setelah Perang Dingin, khususnya sejak awal 2000-an, kebijakan nonproliferasi AS lebih fokus pada sisi pasokan (menolak 'negara-negara jahat' akses ke bahan-bahan nuklir). Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat, yang diterbitkan pada bulan September 2002, dan Strategi Nasional untuk Memerangi Senjata Pemusnah Massal, diterbitkan pada bulan Desember 2002. Dorongan strategi baru adalah bahwa musuh baru (negara-negara jahat dan teroris) berbeda dari yang lama (Uni Soviet). Strategi lama (pencegahan) berhasil menahan ancaman militer dari Uni Soviet, tetapi tidak akan efektif dalam menghadapi musuh-musuh baru. Musuh-musuh baru ini perlu dihilangkan dan ditolak akses ke WMD. Tindakan-tindakan AS dalam kapasitasnya sebagai "pemimpin" pengembangan nuklir dunia ini selalu berusaha untuk melindungi keamanan dunia dari destruksi yang tidak diinginkan hasil pengembangan senjata nuklir, terutama terhadap Negara-negara yang tidak menandatangani NPT.

AS kemudian sering mengeluarkan Kebijakan AS dalam menerapkan strategi kerap disebut *strategic hedging*. Melalui strategi ini, Amerika Serikat bermaksud untuk membuka peluang bagi dirinya dalam mempertahankan hubungan ekonomi yang menguntungkan seperti dalam salah satu aspek kepentingan nasional Amerika Serikat. Strategi Hedging ini diterapkan AS di kawasan Asia khususnya bagi negara Jepang dan India. Dalam pandangan AS, India merupakan negara strategis untuk menerapkan strategi *hedging*. AS mengharapkan terciptanya sebuah kondisi yang membuat China untuk merivisi tatanan global dan regional yang berlaku. Sehingga dalam penerapan ini, antara Jepang, Korea Selatan dan India merupakan tiga negara pendamping AS di Asia. Ketiga negara tersebut mempunyai *deterrence* yang tinggi, sehingga menimbulkan *security dilemma* AS.

Double Standard yang diperlihatkan AS dalam kebijakannya terhadap program Nuklir India yang pada awalnya ditentang habis-habisan dan program Nuklir Iran yang pada awalnya didukung sepenuh hati memperlihatkan perubahan stigma dalam kebijakan AS. Hal ini terjadi karena adanya perubahan *national interest* AS dan negara-negara yang terlibat (AS-India-Iran) dan *security dilemma* yang dialami AS akibat perkembangan dan perubahan negara-negara di regional Asia dan Timur Tengah. Robert Blackwill, mencatat, "Presiden George W. Bush mendasarkan transformasi pada hubungan AS-India pada prinsip strategis inti demokrasi India sebagai faktor kunci yang menyeimbangkan kebangkitan kekuatan Cina." Blackwill menambahkan, tanpa adanya faktor China ini, "Pemerintahan Bush tidak akan merundingkan perjanjian nuklir sipil dan Kongres tidak akan menyetujuinya." Hubungan Washington yang semakin kuat dengan India dipandang sebagai bagian dari strategi besar untuk mengendalikan China. *China Daily* melaporkan, "Amerika Serikat membuat pengecualian untuk mengakomodasi India "didorong oleh" pertimbangan geo-politik "dalam" menjaga keseimbangan strategis regional. "

Sedangkan Iran dianggap dianggap sebagai negara yang dipimpin dengan rezim "rouge" sehingga kepemilikan nuklir hanya akan berdampak buruk untuk AS dan negara-negara barat mengingat ketidakpercayaan AS dan sekutunya terhadap Iran. Namun dari analisa bab sebelumnya terlihat bahwa hal ini timbul karena perbedaan *interest* AS dan tujuan Iran . Di satu sisi AS mungkin, *double standard* ini membantu negara- negara yang memperhatikan kepentingan geopolitik dan ekonomi Washington dalam program nuklir mereka; di sisi lain,

AS terlihat mencoba untuk mencegah negara-negara yang tidak setuju dengan kebijakan luar negeri AS dalam menguasai teknologi nuklir.